



Peristiwa Kudatuli 1996: Gerakan Rakyat dan Pertarungan Politik di Masa Orde Baru

¹Fieva Hylmi Kurniawan

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia. E-mail hylmifieva@students.unnes.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Kudatuli 1996, New Order, People's Movement, Reform

Kata Kunci:

Kudatuli 1996, Orde Baru, Gerakan Rakyat, Reformasi

How to cite :

Kurniawan, F. H. (2025). Peristiwa Kudatuli 1996: Gerakan rakyat dan pertarungan politik di masa Orde Baru. *Jambura History and Culture Journal*, 7(1), 1-23.

DOI:

10.37905/jhcj.v7i1.28805

Submitted : 10 Desember 2024.
Accepted : 26 Januari 2025
Published : 31 Januari 2025

ABSTRACT

The Kudatuli incident (Kudapangan Date Lima) in 1996 was a critical moment in Indonesian political history during the New Order era which marked the escalation of conflict between government forces and the pro-democracy movement. This research aims to analyze the people's movements and political dynamics that occurred around this event, as well as their implications for the political stability of society. Using critical historical research methods with a qualitative approach, this research examines historical documents, media reports and in-depth interviews with historical witnesses. The research results show that Kudatuli reflects the accumulation of tension between the political opposition and the government, with the people's movement as an expression of resistance to authoritarianism

ABSTRAK

Peristiwa Kudatuli (Kudapangan Tanggal Lima) pada 1996 merupakan momen kritis dalam sejarah politik Indonesia pada masa Orde Baru yang menandakan eskalasi konflik antara kekuatan pemerintah dan gerakan pro-demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan rakyat dan dinamika politik yang terjadi di sekitar peristiwa ini, serta implikasinya terhadap stabilitas politik masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji dokumen historis, laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kudatuli mencerminkan akumulasi ketegangan antara oposisi politik dan pemerintah, dengan gerakan rakyat sebagai ekspresi perlawanan terhadap otoritarianisme

Copyright © 2024 JHCJ. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pemberontakan Kudatuli tahun 1996 merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yang mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan

perebutan antara negara dan rakyat selama rezim Orde Baru. Setelah Presiden Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya, Jenderal Soeharto mengambil alih kepemimpinan negara, dan periode ini dikenal dengan sebutan Orde Baru. Dimulai dari "Surat Perintah 11 Maret" atau "Supersemar", yang menjadi tonggak berdirinya Orde Baru. Melalui Supersemar, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengambil langkah-langkah untuk menciptakan pembaruan serta stabilitas politik. Surat perintah ini juga menandai berakhirnya kekuasaan Soekarno bersama konsep demokrasi terpimpin yang ia usung. Pada masa tersebut, pemerintahan lebih memprioritaskan upaya untuk menjaga stabilitas politik demi mendukung proses pembangunan nasional. Orde Baru merujuk pada periode kepemimpinan Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1965 hingga 1998. Era ini ditandai oleh pemerintahan otoriter, terpusat, serta fokus pada pembangunan nasional.

Dalam perkembangannya, Orde Baru mengklaim bahwa stabilitas dan pembangunan harus segera diwujudkan. Namun, pendekatan yang digunakan justru menindas dan mengabaikan kepentingan rakyat. Beban ekonomi yang berat kala itu menjadi tanggung jawab Bersama, sebagai dampak langsung dari akumulasi pelanggaran terhadap kedaulatan rakyat selama lebih dari 25 tahun. Peringatan Bung Hatta tentang bahaya Demokrasi Terpimpin ternyata relevan pula bagi system Orde Baru. Tanpa adanya kedaulatan rakyat, keduanya hanyalah "Bangunan Rapuh". Karena ketiadaan kedaulatan tersebut, merusak system politik, ekonomi, dan hukum oleh rezim Soeharto terus dibiarkan hingga akhirnya bangsa dan negara tidak mampu lagi menampung beban tersebut. Semua ini berakar pada keserakahan yang tidak mengenal batas. (Eickhoff et al., 2017).

Selama periode ini, militer memainkan peran penting dalam mempertahankan kendali politik, sering kali menggunakan Tindakan keras untuk menekan perbedaan pendapat dan oposisi. (Chandra & kammen, 2002). Transisi menuju Demokrasi setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998

menyaksikan munculnya lebih dari seratus partai politik baru, yang menandai perubahan signifikan dalam lanskap politik negara ini (Eddyono, 2020). Transisi demokrasi tersebut diiringi dengan perubahan konstitusi, penggantian desentralisasi administrative dengan otonomi daerah, dan pembatasan peran militer dalam politik dan masyarakat sipil. Transformasi politik ini menciptakan peluang baru bagi berbagai actor negara dan non-negara untuk mengartikulasikan dan mengekspresikan visi budaya dan politik mereka, yang telah ditekan selama masa era Soeharto (Eddyono, 2020).

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk merapikan kembali system politik di tanah air memunculkan berbagai konflik. Konflik tersebut pada umumnya terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu konflik yang terjadi dalam pemerintahan adalah peristiwa 27 Juli 1996, yang dikenal sebagai Peristiwa Kudatuli, yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). PDI Perjuangan merupakan salah satu partai yang turut berpartisipasi dalam pemilu 1999. Sejarah awal PDI Perjuangan tidak dapat dipisahkan dari Partai Demokrat Indonesia yang mengusung platform nasionalisme. Peristiwa ini dimulai dari Era Kebangkitan Nasional yang dipelopori oleh para pemuda mahasiswa Indonesia, dan berlanjut melalui hasil kongres pemuda 28 Oktober 1928 yang mengusung "Soempah Pemoeda" dan dimotori oleh pemuda.

Pada masa Rezim Orde Baru, untuk mencegah PDI dibawah kepemimpinan Megawati menjadi ancaman serius, pemerintah melakukan intervensi dengan kekerasan. Pada Juni 1996, ABRI berhasil memanipulasi kongres luar biasa PDI, yang mengakibatkan Megawati di copot dari jabatan ketua dan digantikan oleh Soerjadi. Meski sebelumnya Soerjadi tidak mendapatkan kepercayaan penuh dari Soeharto, ia dianggap sebagai pilihan yang aman dibandingkan Megawati.

Pemberontakan Kudatuli merupakan respon terhadap upaya pemerintah untuk menggusur paksa penduduk dari rumah mereka di wilayah Kudatuli, Jakarta. Militer, yang diwakili oleh Jenderal Soeharto, telah memerintah negara

tersebut sejak kudeta 1965, dan rezim otoriter tersebut tampaknya telah melunak dalam beberapa tahun terakhir, dengan melemahnya peran Angkatan Bersenjata Indonesia dalam proses politik. Presiden Soeharto mengangkat lebih sedikit personel militer kedalam kabinetnya tahun 1993 dan memilih seorang warga sipil untuk menjadi ketua umum Golkar, partai yang berkuasa, sementara juga mengurangi komposisi militer Golkar di tingkat nasional dan jumlah perwakilan militer di DPR yang akan datang (Suryadinata, 1997).

Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai cara, dari yang ringan hingga berat, untuk menghalangi Megawati memasuki panggung politik nasional. Namun, upaya tersebut tampaknya tidak berhasil. Popularitas Megawati terus meingkat, bahkan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Megawati dipandang sebagai simbol perlawanan rakyat dan pemersatu dalam menghadapi rezim otoriter. Atas dasar itu, Megawati semakin teguh berjuang demi hak-hak rakyat, memperjuangkan demokrasi, serta menjunjung nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meskipun Megawati kerap dianggap sebagai figure yang belum sepenuhnya berpengalaman dalam dunia politik, karir politiknya terus mengalami kemajuan. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh harapan dan kebutuhan masyarakat, khususnya pendukung PDI, akan sosok yang mampu membawa pembaharuan, menyatukan pihak, dan bersih dari kepentingan kelompok tertentu. Namun, Pemberontakan Kudatuli menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk mempertahankan kendali atas penduduk masih berlangsung, bahwa militer terus memainkan peran penting dalam menekan perbedaan pendapat. Pemberontakan tersebut disambut dengan Tindakan keras oleh pasukan keamanan, yang mengakibatkan banyak korban dan penangkapan. Peristiwa-peristiwa seputar pemberontakan Kudatuli dan respons negara terhadapnya menggambarkan sifat transisi politik yang kompleks dan seringkali bergejolak di Indonesia selama akhir era Orde Baru (Fuad, 2023) (Zulham & Romadhona, 2021) (Suryadinata, 1997) (Chandra & Kammen, 2002).

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, studi literatur adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat data Pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Metode ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).

3. Pembahasan

Dalam pembahasan kali ini, akan dibahas berbagai persoalan dan dinamika politik yang terjadi selama masa Orde Baru, dengan fokus pada peristiwa Kudatuli 1996. Pembahasan dimulai dari menggambarkan kondisi sosial-politik Indonesia pada tahun 1990-an, berlanjut dengan penjelasan mengenai latar belakang konflik politik yang memuncak pada peristiwa Kudatuli, hingga analisis dampaknya terhadap gerakan rakyat dan struktur kekuasaan Orde Baru.

3.1. Latar Belakang Sosial-Politik Pada Masa Orde Baru

Rezim Orde Baru didirikan oleh sebuah koalisi yang mengandalkan kekuatan sosial yang signifikan dukungan. Indonesia mengalami konflik ekonomi, sosial, dan politik yang mendalam pada akhir abad ke-19. Pengangkatan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-2 menggantikan Soekarno secara langsung membawa Indonesia memasuki era pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan sebutan Orde Baru. Sejak awal pemerintahan Orde Baru, fokus utama bergeser dari politik yang sebelumnya menjadi prioritas pada masa Soekarno, menuju ekonomi sebagai pusat perhatian. Karakter anti-partai politik yang di terapkan oleh Orde Baru mencerminkan upaya rezim ini untuk mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalkan persoalan politik di tengah masyarakat. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh peran penting para ekonom-teknokrat yang menginisiasi konsep "Pembangunanisme". Mereka berargumen bahwa politik perlu dikesampingkan demi memberi ruang bagi proses pembangunan. (ibid, hlm 17)

Dalam upaya menciptakan stabilitas politik, rezim Orde Baru tidak hanya terbatas pada pengintegrasian kekuatan partai-partai politik kedalam struktur pemerintahan, yang menghasilkan tiga partai utama: Golkar, PDI, dan PPP. Langkah berikutnya yang diambil oleh Presiden Soeharto dan para pemimpin Orde Baru adalah penyeragaman asas dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar tunggal. Kebijakan ini awalnya di terapkan pada partai-partai politik, namun kemudian meluas mencangkup organisasi sosial, budaya, keagamaan, serta kalangan pelajar dan Mahasiswa. Pembangunanisme pada era Orde Baru lebih terfokus pada pembangunan di bidang ekonomi. Dalam paradigma ini, diyakini bahwa peningkatan kesejahteraan sosial, termasuk pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan berbagai program sosial lainnya, hanya dapat terwujud jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi berhasil di capai. Pelaksanaan konsep pembangunanisme ini didukung oleh kebijakan stabilitas politik yang dijalankan oleh ABRI melalui implementasi Dwi fungsi ABRI.

Selain didukung oleh kekuatan konfigurasi politik yang kokoh, keberlanjutan rezim Orde Baru juga di perkuat oleh serangkaian struktur ideologis. Rezimi ini menggunakan berbagai struktur ideologi untuk melegitimasi setiap langkah politiknya. Akibatnya, meskipun kebijakan-kebijakan yang diterapkan sering kali bertentangan dengan kepentingan Bersama, masyarakat tetap dapat “menerima”. Beberapa struktur ide tersebut meliputi konsep negara integralistik, paham developmentalisme, Dwi fungsi ABRI, monopoli dalam penafsiran Pancasila, anti-komunisme, serta penyalahgunaan demokrasi sebagai kambing hitam. Pada tingkat analisis yang lebih rinci, para pengamat berpendapat bahwa politik Indonesia semakin menunjukkan pola sentralisasi yang dominan. Jika pada awal Orde Baru kekuasaan politik Indonesia berada di bawah kendali militer sebagai institusi, maka sejak awal 1980-an, sentralisasi tersebut telah beralih ke kepemimpinan pribadi Soeharto (Pratikno, 1998:19).

Salah satu keunggulan pemerintahan Orde Baru adalah kemampuannya menciptakan stabilitas politik melalui pemerintahan yang kuat. Stabilitas ini menjadi faktor pendukung keberhasilan Orde Baru dalam membangun pijakan di sector lain, khususnya menarik investasi asing yang mendorong pertumbuhan ekonomi makro dengan pencapaian yang luar biasa. Terkait dengan sumber kekuasaan pertama, yaitu represi, penting untuk dicatat bahwa pada awal 1970-an, Ketika pemerintah Orde Baru berusaha membangun konsolidasi politik, kekerasan menjadi instrument utama yang digunakan untuk mencapai stabilitas politik. Aktivitas politik dari periode sebelumnya diberangus, dan ruang gerak bagi kekuatan oposisi juga diperketat. Untuk mendukung tujuan tersebut, berbagai badan intelejen dibentuk untuk mengawasi masyarakat, antara lain BAIS (Badan Intelijen Strategis) yang melibatkan unsur-unsur militer, BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen) yang Sebagian besar diisi oleh kalangan sipil, serta institusi Pendidikan seperti Lembaga Sandi Negara dan unit Jaksa Agung Muda bidang Intelijen.

Sumber utama kedua yang dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk membangun system politik untuk membangun system politik yang otoriter adalah konsentrasi kekuasaan material, yang dikenal sebagai klientelisme ekonomi. Pola ini berhasil diterapkan berkat melimpahnya sumber daya ekonomi yang diperoleh dari ekspor minyak dan hasil alam lainnya. Dengan memanfaatkan sumber daya tersebut, Soeharto mampu secara efektif membeli dukungan dari para elit politik dan masyarakat luas (Pratikno, 1998:21). Karena menghadapi tantangan dalam meraih dukungan politik yang tulus dari masyarakat, Orde Baru mengembangkan "money politics" untuk memperoleh kesetiaan dari kalangan elit. Berbagai insentif ekonomi diberikan kepada elit yang menunjukkan loyalitas, sedangkan mereka yang memilih untuk melawan atau menjaga jarak dari kekuasaan dikenakan sanksi berupa pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Insentif yang diberikan mencakup berbagai bentuk, seperti dukungan politik istimewa terhadap bisnis para pendukung setia, akses terhadap proyek-proyek pembangunan pemerintahan,

serta kebebasannya untuk melakukan korupsi terhadap dana negara. Meskipun menyebabkan inefisiensi ekonomi dan tingkat korupsi yang sangat tinggi, strategi ini terbukti menjadi alat yang efektif bagi pemerintah Orde Baru dalam membangun kesetiaan kalangan elite politik.

Sumber kekuasaan politik otoritarianisme Orde Baru yang ketiga adalah ideologisasi melalui definisi-definisi partikularistik terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara, dengan tujuan utama melegitimasi otoritarianisme. Contohnya adalah Konsep Demokrasi Pancasila, interpretasi tentang hak asasi manusia, serta pemahaman mengenai tanggung jawab warga negara. Definisi-definisi ini digunakan untuk membangun "keabsahan" moral rezim Orde Baru sebagai otoriter, yang dicapai dengan manipulasi standar meralitas alih-alih berupaya memenuhi standar moral yang sebenarnya. Jika politik represi (*management of fear*) dan klientelisme ekonomi berfungsi sebagai mekanisme untuk mengontrol perilaku politik, maka politik wacana digunakan sebagai sarana untuk mengontrol persepsi dan pola pikir masyarakat termasuk para partisipan politik.

Sumber kekuatan otoritarianisme Orde Baru yang keempat adalah subordinasi sektor bisnis terhadap negara. Dalam pandangan Robinson (1988), subordinasi ini berarti bahwa Orde Baru cenderung membuat sektor bisnis bergantung pada negara. Situasi ini diperburuk dengan kemunculan apa yang disebut Robinson (1988) sebagai *politico-bureaucrat entrepreneurs*, yaitu pengusaha yang berasal dari keluarga pejabat, memiliki hubungan kekerabatan, atau menjalin relasi kroni dengan para pejabat negara. Akibatnya, fondasi perekonomian Indonesia semakin lemah karena cenderung berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek. Dapat dikatakan bahwa hidup matinya bisnis akan bergantung pada hidup matinya negara (Hidayat, 2021). Subordinasi sektor bisnis terhadap negara tercermin, misalnya dalam penyatuan kelompok-kelompok profesi dan kepentingan. Kelompok-kelompok ini, meskipun memiliki posisi penting di mata anggotanya, sangat

rentan terhadap intervensi negara dari sisi atas. Organisasi-organisasi perwakilan ini dibedakan berdasarkan fungsi dan profesi anggotanya (Marclntyre, 1990:23). Para pengusaha, buruh, petani, guru, dan wartawan dikelompokkan dalam organisasi profesi yang berada di bawah kendali ketat pemerintah. Akibatnya, ruang partisipasi masyarakat menjadi semakin terbatas

Sumber kekuatan Otoritarianisme Orde Baru yang kelima adalah pengendalian terhadap birokrasi sipil dan militer. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya konsolidasi politik oleh rezim Orde Baru. Salah satu tantangan utama dalam system pemerintahan Orde baru adalah menciptakan system politik yang andal untuk mendukung pembangunan ekonomi serta sector-sektor lainnya. Meskipun fokus awal Orde Baru diarahkan kepada pemulihan dan pembangunan ekonomi, aspek lain yang tak kalah penting, selain pertahanan dan keamanan, adalah penataan serta penguatan system politik. Orde Baru berupaya memanfaatkan birokrasi sebagai Primum Mobile alias penggerak utama (Mas'oed, 1989; 150). Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan tipe birokrat yang lebih aktif dan lebih tanggap terhadap kepentingan Orba. Birokrasi juga difungsikan secara luas dan rapi untuk memuluskan program-program pembangunan. Gaji pejabat dinaikkan fasilitas penunjang disediakan untuk merangsang produktifitas.

Mengapa Soeharto Memilih Jalan Otoritarianisme

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru meninggalkan berbagai masalah serius, termasuk instabilitas politik dan terhentinya agenda pembangunan ekonomi Indonesia di era Soekarno. Oleh karena itu, pada awal pemerintahan Orde Baru, dinamika politik Indonesia dikendalikan oleh kekuatan militer sebagai sebuah institusi. Namun, memasuki tahun 1980-an, kendali politik semakin terpusat pada kepemimpinan pribadi Soeharto. Konsolidasi kekuasaan Orde Baru memberikan ruang yang sangat besar bagi militer untuk mendominasi jalannya proses politik. Menurut Harold Crouch (1986), dominasi ini bermula dari

mandate yang diberikan kepada militer untuk “memulihkan” situasi nasional yang saat itu berada dalam kekacauan

Dominasi militer dalam mendukung Orde Baru diawali dengan eliminasi sistematis terhadap kelompok komunis di berbagai daerah. Militer merebut dan menduduki tanah-tanah milik petani yang tergabung dalam organisasi seperti BTI, begitu pula dengan aktivis buruh di perkebunan-perkebunan di Sumatera yang berafiliasi dengan SOBSI. Aksi-aksi ini bukan hanya soal penguasaan lahan atau perkebunan, tetapi juga mencerminkan perubahan drastis dalam relasi kekuasaan. Peran sipil, seperti petani dan buruh yang sebelumnya merupakan aktor penting dalam politik, berbalik menjadi tunduk di bawah kendali militer tanpa perlawanan. Akibatnya control militer atas politik dalam negeri menjadi mutlak.

Pada awal pemerintahannya, Orde Baru menerapkan restrukturisasi politik secara sistematis untuk mengkonsolidasikan elemen-elemen kekuasaan dan menciptakan stabilitas politik yang terkontrol demi mendukung pembangunan. Dalam pandangan Orde Baru, pembangunan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa stabilitas politik. Stabilitas ini, pada gilirannya, lebih mudah diwujudkan melalui model kekuasaan yang sentralistik guna mempermudah pengawasan. Hal ini menjadi dasar Orde Baru mengadopsi pola Otoritarianisme dalam menjalankan pemerintahannya.

3.2 Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996

Peristiwa Kudatuli, singkatan dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli, berakar pada konflik internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang melibatkan dua kubu utama yakni Megawati Soekarnoputri, yang terpilih sebagai ketua umum PDI melalui kongres Surabaya 1993, dan kubu Soerjadi, yang dipilih kembali sebagai ketua dalam kongres Medan pada Juni 1996 dengan dukungan pemerintah orde baru. Selama masa Orde Baru, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) kerap menghadapi berbagai gejolak dan konflik internal. Salah satu momen penting adalah terjadinya perpecahan dalam tubuh

PDI yang dipicu oleh terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum, sebuah keputusan yang tidak disetujui oleh rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto.

Konflik antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Suryadi bermula pada pelaksanaan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia pada 22 Juni 1996 di Medan, Sumatra Utara. Ketua Umum PDI, Soerjadi, telah mengeluarkan keputusan untuk mengadakan Kongres Luar Biasa PDI di Medan dengan alasan untuk menyelesaikan konflik dalaman yang berlaku di dalam parti tersebut pada waktu itu. Kongres ini dihadiri oleh lebih dari 1000 peserta yang terdiri daripada kader PDI dari pelbagai daerah di Indonesia. Namun, sebahagian besar peserta kongres tersebut menolak keras keputusan Soerjadi untuk menyelenggarakan kongres di Medan, dan mereka kemudian memboikot kongres tersebut. Pihak yang menolak kongres ini diketuai oleh Megawati Soekarnoputri, yang merupakan anak sulung dari Presiden Soekarno, tokoh penting dalam penubuhan Partai Demokrasi Indonesia.

Megawati dan para pendukungnya menolak mengakui hasil kongres tersebut dan mengajukan tuntutan hukum atas intervensi pemerintah. Megawati tetap mempertahankan keberadaannya di kantor pusat PDI di Jakarta, yang menjadi pusat perlawanan terhadap Rezim. Penolakan tersebut menarik perhatian luas, dengan banyak pidato public berlangsung disana. Aktivis pro-demokrasi, organisasi non-pemerintah (LSM), dan kelompok miskin perkotaan yang marah turut berdemonstrasi untuk mendukung perjuangan Megawati. Perpecahan semakin nyata setelah kongres di Medan pada tahun 1993, yang kemudian berlanjut pada kongres luar biasa PDI di Surabaya pada Desember 1993, dimana Megawati secara resmi terpilih sebagai ketua umum. Kemenangan Megawati Soekarnoputri dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Surabaya pada tahun 1993, Kemenangan tersebut dianggap sebagai ancaman bagi rezim Orde Baru.

Megawati tetap mempertahankan keberadaannya di kantor pusat PDI di Jakarta, yang menjadi pusat perlawanan terhadap Rezim.

Isu utama yang mencetuskan konflik ini adalah pertikaian antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi mengenai kepemimpinan dalam parti. Kubu Megawati menyifatkan bahawa Soerjadi telah melakukan penyelewengan kuasa dengan melaksanakan Kongres Luar Biasa PDI tanpa persetujuan daripada majoriti kader PDI. Mereka menganggap bahawa keputusan Soerjadi untuk melaksanakan kongres di Medan adalah tidak sah, dan menuntut supaya parti PDI berada di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Di pihak lain, kubu Soerjadi menegaskan bahawa kongres di Medan adalah sah dan Soerjadi masih kekal sebagai Ketua Umum PDI yang sah.

Untuk menghadapinya, dilakukan upaya rekayasa politik yang bertujuan mengembalikan Soerjadi sebagai Ketua PDI. Langkah ini diikuti dengan aksi perebutan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro pada tanggal 27 Juli 1996. Pada Sabtu, 27 Juli 1996, Jakarta dilanda kerusuhan yang menghanguskan ibu kota dan memicu ketegangan politik di tingkat nasional, peristiwa di mengejutkan warga Jakarta, mengingatkan mereka pada insiden kekerasan politik sebelumnya, seperti peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Pada pukul 06.20, massa pendukung Soerjadi mulai tiba di lokasi. Sebelumnya, berlangsung dialog singkat selama sekitar 15 menit antara delegasi pendukung Soerjadi dan kubu pendukung Megawati. Di dalam dialog tersebut, pihak pendukung Megawati mengusulkan agar kantor dinyatakan dalam status quo. Namun, kesepakatan tidak berhasil tercapai.

Konflik ini semakin memuncak apabila pada 27 Juli 1996, Kantor Pusat DPP PDI yang terletak di Jl. Diponegoro, Jakarta, telah diserang oleh sekumpulan orang yang disyaki sebagai orang suruhan Soerjadi. Serangan ini berlaku ketika penyokong Megawati sedang mengadakan acara di dalam bangunan tersebut. Dalam serangan tersebut, penyokong Megawati

Soekarnoputri telah mengalami kekacauan dan keganasan yang dilancarkan oleh penyokong kubu Soerjadi. (Priyowidodo, 2014).

Pada pukul 06.35 WIB, terjadi bentrokan antara kedua kubu yang mulai terjadi. Massa pendukung Soerjadi mulai melempari kantor DPP PDI dengan batu dan juga paving block. Sebagai balasan, kubu pendukung Megawati melemparkan berbagai benda yang ada di sekitar halaman kantor. Sebanyak 300 pendukung Megawati yang berada di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro diserang oleh sekelompok orang berbaju merah, yang melemparkan benda-benda api dan tiba di lokasi menggunakan truk. Pasukan merah kubu megawati merespons dengan melemparkan batu dan benda-benda yang memicu api. Akibatnya spanduk yang menutupi seluruh bagian depan kantor PDI habis terbakar.

Bentrokan fisik pun tak terhindarkan. Terdapat 4 korban jiwa, semua akses menuju jalan Diponegoro telah di blockade oleh aparat kepolisian. Perempatan Matraman menuju jalan Proklamasi juga ditutup menggunakan seng-seng milik dinas pekerjaan umum yang digunakan untuk proyek pembangunan jembatan layang Pramuka-jalan tambak Akhirnya, massa pendukung Soerjadi berhasil menduduki kantor PDI. Pada pukul 09.24, massa yang berada di area belakang Gedung SLPTN 8 dan 9, disisi kantor PDI dan PPP, mulai mundur setelah pasukan yang sebelumnya hanya bersiaga di bawah jembatan kereta api dikerahkan untuk memberikan bantuan.

Pada pukul 09.35, massa yang berkumpul di depan Megaria, menghadapi blockade polisi anti huru-hara. Mereka melemparkan batu saat sebuah mobil ambulans dari sub Dinas kebakaran Jakarta berusaha melewati kerumunan massa dan polisi di depan bank BII di pertigaan Megaria. Massa yang berada di depan Gedung bioskop Megaria dan Bank BII juga menekankan yel-yel sambil bernyanyi "Mega pasti menang, pasti menang, pasti menang." Pada pukul 09.45, pada saat itu, asap hitam tebal terlihat mengepul dari Gedung DPP PDI. Seorang anggota satgas PDI pendukung Megawati menyebutkan bahwa

sebagian kantor PDI sempat dibakar, dan dokumen-dokumen di dalamnya telah dimusnahkan. Sementara sekitar 300 orang mengalami luka berat, termasuk 50 anggota dari cabang-cabang Jawa Timur yang tengah berjaga di kantor tersebut. Pada pukul 11.30, jumlah massa terus bertambah dan terbagi menjadi 3 kelompok di lokasi yang berbeda, yaitu di depan bioskop Megaria, di depan Bank BII, dan di depan kantor Telkom.

Pada pukul 13.52, pengacara Megawati, R.O. Tambunan, menyampaikan pidato di depan Kantor PDI. Ia menegaskan bahwa kantor DPP diduduki karena Megawati merupakan pemimpin yang sah. Pada pukul 14.05, Soetardjo Soerjogoeritno, salah satu pimpinan DPP PDI yang mendukung Megawati, tampak mendekati Kantor PDI. Ia kemudian terlihat berbicara dengan Kapolres Jakarta Pusat terkait status kantor tersebut. Sementara itu, sekitar pukul 19.00, kerumunan massa mulai memenuhi Jalan Proklamasi. Tak lama kemudian, mereka melakukan pembakaran terhadap toko Circle K, Studio SS Foto, dan sejumlah bangunan lainnya. Aksi tersebut dilaporkan berlangsung hingga pukul 01.00 dini hari.

Salah satu pihak yang dianggap kontroversial dan berada di balik aksi tersebut adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam pertemuan dengan ABRI, Menko Polhukam, Letjen TNI Syarwan Hamid, menjelaskan bahwa PRD memiliki kesamaan dengan PKI. Hal ini terlihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam manifesto politik mereka yang bertanggal 27 Juli 1996. PRD tidak berlandaskan Pancasila dan menyerukan perlawanan terhadap pemerintah. Namun, PRD hanya merupakan salah satu pihak yang memanfaatkan momentum dalam peristiwa Kudatuli. situasi memanas dengan pengambilalihan Kantor DPP PDI yang sebelumnya menjadi pusat PDI Megawati Soekarnoputri. Kantor di Jalan Diponegoro No. 58 tersebut diambil alih oleh kelompok DPP PDI hasil Kongres Medan, yang merupakan pendukung Soerjadi. Hingga Sabtu pagi, kerusuhan masih meluas di beberapa

wilayah Jakarta, mengakibatkan kerusakan pada sejumlah gedung pemerintah dan swasta di kawasan Salemba Raya, serta jatuhnya korban.

Awal dari peristiwa tragis pada 27 Juli 1996 berakar pada tindakan represif pemerintah terhadap PDI dan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Kerusuhan massa yang terjadi akibat pengambilalihan kantor PDI tidak terlepas dari meningkatnya popularitas Megawati, yang bertolak belakang dengan upaya Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) yang didukung oleh Jenderal Hartono dan sejumlah petinggi ABRI untuk mempromosikan dirinya sebagai "putri mahkota" melalui jalur Golongan Karya (Golkar). Kepemimpinan Megawati sebagai Ketua Umum PDI dianggap sebagai ancaman oleh rezim Orde Baru. Kekhawatiran Soeharto memuncak karena popularitas Megawati dinilai dapat mengguncang stabilitas pemerintahannya, apalagi setelah Aberson Sihalohe, salah satu aktivis PDI, mulai menyebarkan formulir dukungan terhadap Megawati sebagai calon presiden, disertai ramalan politik Permadi yang menyebutkan bahwa "Megawati akan menjadi presiden ketiga menggantikan Soeharto." Dalam konteks inilah Soeharto mengeluarkan instruksi untuk melemahkan Megawati dan para pendukungnya.

3.3 Dampak Peristiwa Kudatuli Terhadap Gerakan Rakyat Dan Transisi Politik

Peristiwa Kudatuli 1996 menjadi momen penting yang memicu mobilisasi gerakan rakyat melawan otoritarianisme Orde Baru. Konflik yang berawal dari upaya pemerintah untuk menggulingkan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) memunculkan perlawanan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Gerakan ini tidak hanya melibatkan anggota partai tetapi juga menarik perhatian mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, dan masyarakat urban yang terpinggirkan. Kudatuli menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap intervensi negara yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang dalam kehidupan politik nasional (Chandra & Kammen, 2002). Keterlibatan berbagai kelompok dalam Kudatuli menunjukkan

adanya kesadaran bersama tentang pentingnya melawan dominasi negara yang otoriter. Sebagai contoh, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi salah satu organisasi yang secara terang-terangan mendukung perjuangan Megawati dan mengkritik keras kebijakan represif pemerintah. Menurut Hadiz (2013), PRD melihat Kudatuli sebagai momentum untuk menyatukan berbagai kelompok pro-demokrasi yang sebelumnya bergerak secara sporadis. Upaya ini berhasil memobilisasi ribuan massa untuk turun ke jalan dan menunjukkan solidaritas lintas kelas sosial.

Mahasiswa memainkan peran penting dalam memobilisasi gerakan rakyat selama Kudatuli. Melalui jejaring kampus dan organisasi mahasiswa, mereka menyebarkan informasi tentang ketidakadilan yang dialami oleh PDI dan mengorganisir aksi protes besar-besaran. Menurut Fuad (2023), mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai katalisator protes tetapi juga sebagai penghubung antara kelas menengah dan kelas bawah. Peran mahasiswa ini memperkuat legitimasi gerakan rakyat sebagai kekuatan kolektif yang mampu menekan pemerintah untuk mengubah pendekatannya. Kudatuli juga memperlihatkan peran penting media dalam mendukung gerakan rakyat. Meski media massa utama saat itu berada di bawah pengawasan ketat pemerintah, beberapa media alternatif dan jurnalis independen berani meliput dan mempublikasikan kejadian di lapangan. Informasi ini memperkuat simpati publik terhadap perjuangan Megawati dan menciptakan tekanan politik bagi pemerintah Soeharto. Media menjadi saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarluaskan narasi perlawanan terhadap otoritarianisme (Aspinall, 2005).

Selain mahasiswa dan media, organisasi non-pemerintah (LSM) turut ambil bagian dalam gerakan rakyat selama Kudatuli. LSM yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat secara aktif mendukung perjuangan para korban represifitas pemerintah. Mereka memberikan bantuan hukum bagi aktivis yang ditangkap dan menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi selama peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana Kudatuli memobilisasi berbagai sektor masyarakat sipil untuk

berkolaborasi melawan otoritarianisme Respon represif pemerintah terhadap gerakan rakyat justru memperkuat tekad kelompok oposisi. Kekerasan yang dilakukan aparat keamanan selama Kudatuli menarik perhatian internasional dan mengundang kritik terhadap pemerintah Soeharto. Hadiz (2013) mencatat bahwa dukungan internasional terhadap gerakan rakyat Indonesia mulai terlihat pasca-Kudatuli, yang kemudian menjadi salah satu faktor pendukung dalam transisi politik menuju Reformasi. Intervensi internasional ini juga menjadi indikator bahwa tekanan terhadap pemerintah Soeharto tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari komunitas global.

Peristiwa Kudatuli 1996 meninggalkan dampak sosial yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, khususnya di era akhir pemerintahan Orde Baru. Insiden ini menjadi katalisator perubahan dalam pola pikir masyarakat terhadap otoritarianisme negara dan keadilan sosial. Kekerasan yang terjadi, terutama terhadap pendukung Megawati Soekarnoputri dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), menciptakan rasa ketidakadilan yang dirasakan luas oleh berbagai kelompok sosial. Kondisi ini memperkuat kesadaran masyarakat untuk menuntut reformasi dan perubahan sistem politik yang lebih demokratis (Chandra & Kammen, 2002). Salah satu dampak signifikan Kudatuli adalah munculnya solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat, baik dari kalangan urban miskin, mahasiswa, hingga kelas pekerja. Konflik yang terjadi membuka mata banyak pihak akan pentingnya bersatu melawan represi pemerintah. Masyarakat miskin perkotaan, yang sebelumnya kurang terlibat dalam politik, mulai memandang Kudatuli sebagai refleksi dari ketidakadilan yang selama ini mereka alami. Gerakan solidaritas ini memperlihatkan bagaimana ketimpangan sosial dan ekonomi di masa Orde Baru telah menjadi pemicu utama resistensi (Aspinall, 2005).

Masyarakat juga mulai menyadari perlunya pembelaan terhadap hak asasi manusia. Kudatuli menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan kekerasan untuk menekan perbedaan pendapat, sehingga meningkatkan perhatian terhadap isu-isu hak asasi. Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) dan organisasi berbasis masyarakat yang muncul pasca-Kudatuli, fokus pada advokasi hak asasi manusia dan memberikan dukungan kepada korban. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesadaran sosial tetapi juga membangun fondasi bagi gerakan masyarakat sipil yang lebih kuat di masa depan. Peran media dalam membangun opini publik terhadap dampak sosial Kudatuli juga sangat signifikan. Meski sebagian besar media massa saat itu berada di bawah kontrol ketat Orde Baru, sejumlah jurnalis independen dan media alternatif berani mengangkat cerita korban dan dampak sosial dari insiden tersebut. Publikasi ini memperkuat simpati masyarakat terhadap perjuangan rakyat dan menambah tekanan moral bagi pemerintah. Media menjadi salah satu alat penting dalam menyebarluaskan informasi tentang kekerasan dan pelanggaran hak yang terjadi selama Kudatuli (Hadiz, 2013).

Kudatuli juga memengaruhi dinamika hubungan antargenerasi, terutama antara generasi muda dan generasi tua. Generasi muda, terutama mahasiswa, melihat peristiwa ini sebagai bukti kegagalan rezim Orde Baru dalam memenuhi aspirasi rakyat. Mereka menjadi lebih aktif dalam menyuarakan perubahan, sementara generasi tua yang pernah mendukung stabilitas Orde Baru mulai mempertanyakan legitimasi pemerintah. Interaksi ini menciptakan dialog yang lebih intens di dalam keluarga dan masyarakat tentang masa depan politik Indonesia (Fuad, 2023). Kudatuli memberikan dampak psikologis yang mendalam, terutama bagi korban langsung dan keluarga mereka. Trauma akibat kekerasan yang terjadi selama peristiwa ini menciptakan rasa takut yang meluas terhadap pemerintah dan aparat keamanan. Namun, di sisi lain, trauma ini juga memotivasi banyak orang untuk bangkit dan melawan ketidakadilan. Menurut Lane (2007), Kudatuli menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi ketika menuntut perubahan, tetapi juga menunjukkan potensi kekuatan kolektif dalam melawan represi.

Dari sudut pandang politik, Kudatuli berkontribusi pada runtuhnya legitimasi rezim Orde Baru. Kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pendukung Megawati Soekarnoputri menambah tekanan moral bagi

Presiden Soeharto. Reaksi internasional terhadap insiden ini, terutama dari kelompok-kelompok HAM, memperburuk citra pemerintah Indonesia di dunia. Dengan demikian, Kudatuli menjadi salah satu titik awal dari proses delegitimasi yang berujung pada Reformasi 1998. Peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana oposisi politik dapat menggunakan momen konflik untuk menguatkan posisi mereka di mata masyarakat (Lane, 2007). Dalam konteks sosial, Kudatuli memberikan pelajaran penting tentang solidaritas masyarakat dalam melawan ketidakadilan. Dampak jangka panjangnya terlihat pada meningkatnya keterlibatan masyarakat sipil dalam isu-isu politik dan hak asasi manusia. Gerakan masyarakat yang muncul pasca-Kudatuli, seperti aktivisme mahasiswa dan LSM, memperkuat fondasi masyarakat sipil yang kemudian menjadi pilar utama dalam transisi menuju demokrasi. Masyarakat Indonesia belajar bahwa resistensi kolektif dapat menciptakan tekanan yang signifikan terhadap pemerintah otoriter, meskipun membutuhkan waktu dan pengorbanan besar.

Namun, Kudatuli juga menunjukkan kelemahan struktural dalam gerakan oposisi pada masa itu. Meskipun berhasil memobilisasi massa dan menciptakan tekanan politik, gerakan rakyat saat Kudatuli cenderung sporadis dan kurang terorganisasi. Ketergantungan yang besar pada figur Megawati Soekarnoputri sebagai simbol perjuangan juga menjadi kelemahan karena gerakan ini tidak memiliki agenda yang benar-benar terstruktur untuk perubahan setelah Soeharto turun. Hal ini menjadi refleksi penting bagi gerakan sosial dan politik di Indonesia untuk memperkuat strategi mereka (Aspinall, 2005). Dampak ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Kudatuli dan serangkaian kerusuhan yang terjadi setelahnya menciptakan ketidakpastian politik yang memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Banyak investor asing mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Meskipun dampak ini lebih terasa pada masa krisis ekonomi 1997-1998, Kudatuli menjadi salah satu momen awal yang menandai rapuhnya struktur ekonomi-politik di bawah Orde Baru. Pemerintah

Orde Baru tidak mampu mengelola konflik internal partai politik tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi negara (Chandra & Kammen, 2002).

Secara historis, Kudatuli telah memberikan kontribusi penting dalam narasi perjuangan demokrasi di Indonesia. Peristiwa ini mengajarkan bahwa transisi politik membutuhkan perlawanan yang berkelanjutan dan konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Namun, pasca-Reformasi, banyak aktivis dan kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam Kudatuli merasa bahwa cita-cita mereka belum sepenuhnya tercapai. Fragmentasi politik, korupsi, dan munculnya oligarki baru menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar (Hadiz, 2013). Dalam jangka panjang, Kudatuli menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan otoritarianisme adalah proses yang berkelanjutan. Transisi politik yang dimulai dengan runtuhnya Orde Baru memberikan peluang untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif, tetapi juga menuntut konsistensi dalam pengawasan terhadap pemerintah. Analisis ini menunjukkan bahwa Kudatuli tidak hanya relevan sebagai peristiwa sejarah tetapi juga sebagai pelajaran bagi generasi masa depan tentang pentingnya solidaritas, strategi, dan kesabaran dalam menghadapi kekuatan otoriter (Suryadinata, 1997).

4. Kesimpulan

Kudatuli tidak hanya berdampak pada dinamika politik saat itu tetapi juga memperkuat landasan transisi menuju demokrasi. Peran aktif mahasiswa dan LSM dalam mengorganisir gerakan rakyat menunjukkan bahwa mobilisasi massa yang efektif dapat menjadi pendorong utama perubahan politik. Meskipun demikian, studi ini juga menyoroti kelemahan gerakan oposisi yang cenderung bergantung pada figur sentral seperti Megawati Soekarnoputri tanpa strategi struktural yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Kudatuli menjadi pelajaran penting dalam membangun gerakan yang lebih terorganisir dan inklusif di masa depan.

Sebagai saran, kajian mendatang dapat lebih mendalami hubungan antara dinamika lokal dan tekanan internasional dalam proses transisi demokrasi Indonesia. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang Kudatuli terhadap perkembangan gerakan masyarakat sipil pasca-reformasi. Pemerintah dan organisasi masyarakat di masa depan juga dapat belajar dari peristiwa ini untuk menciptakan dialog yang inklusif dalam menghadapi konflik politik, guna menghindari kekerasan dan menciptakan stabilitas yang berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

- Chandra, S., & Kammen, D. A. (2002). Generating reforms and reforming generations: Military politics in Indonesia's democratic transition and consolidation. *World Politics*, 55(1), 96–136.
- Eddyono, S. (2020). Competing nationalisms in post-New Order Indonesia. *Nationalism and Ethnic Politics*, 26(4), 421–439.
- Eickhoff, M., van Klinken, G., & Robinson, G. (2017). 1965 today: Living with the Indonesian massacres. *Journal of Genocide Research*, 19(4), 449–464.
- Priowidodo. (2014). The faces of conflict in a political organization: The case of the Indonesia Democracy Party of Struggle (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(19), 608.
- Rannie, M., Saraswati, R., & Wisnaeni, F. (2023). The phenomenon of political dynasty in regional head elections in Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 23(1), 69–84.
- Sutisna, A. (2017). The proliferation symptoms of political dynasties in Banten under the era of Governor Ratu Atut Chosiyah. *Diponegoro Law Review*, 2(2), 270–286.
- Eklöf, S. (2003). *Power and political culture in Soeharto's Indonesia*. Routledge.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.

- Chandra, S., & Kammen, D. (2002). Repression and resistance: Indonesian politics in the late New Order. *Journal of Southeast Asian Studies*, 33(3), 23–41.
- Hadiz, V. R. (2013). *Social movements in post-authoritarian Indonesia: Repression, resistance, and reform*. Routledge.
- Harris, A. (2018). *The Indonesian student movement and the politics of memory: A history of student activism in Indonesia from the 1970s to the 1990s*. Routledge.
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2020). Masalah-Masalah Hukum, 49(2), 213–221.
- Muhammad, A. (2002). Beyond the anti-American sentiment. *Inter-Asia Cultural Studies*, 3(1), 135–137.
- Fuad, V. (2023). Relationship between young citizens democracy education and good governance. *International Journal of Educational Qualitative Quantitative Research*, 2(1), 35–41.
- Suryadinata, L. (1997). Democratization and political succession in Suharto's Indonesia. *Asian Survey*, 37(3), 269–280.
- Davidson, J. S. (2003). The politics of violence on an Indonesian periphery. *South East Asia Research*, 11(1), 59–89.
- Irmansyah, I., Prasetyo, Y., & Minas, H. (2009). Human rights of persons with mental illness in Indonesia: More than legislation is needed. *International Journal of Mental Health Systems*, 3(1). BioMed Central.
- Catley, B. (1999). Australia in pursuit of human rights in Indonesia. *The International Journal of Human Rights*, 3(1), 1–15.
- Arya Brata, R. (2009). Why did anticorruption policy fail? Implementation of the anticorruption policy of the authoritarian New Order regime in Indonesia, 1971–1998. In C. Wescott, B. Bowornwathana, & L. R. Jones (Eds.), *The many faces of public management reform in the Asia-Pacific region* (Vol. 18, pp. 123–153). Emerald Group Publishing.
- Pratikno. (1998). Keretakan otoritarianisme Orde Baru dan prospek demokratisasi. *JSP*, 2(2), November.

- Crouch, H. (1995). Masalah dwi fungsi ABRI. In S. Haris & R. Sihbudi (Eds.),
Menelaah kembali format politik Orde Baru. Gramedia Pustaka Utama.
- Jackson, K. D. (1978). Bureaucratic polity: A theoretical framework for the
analysis of power and communication in Indonesia. In K. D. Jackson &
L. W. Pye (Eds.), Political power and communication in Indonesia.
University of California Press.
- Mansfield, E., & Snyder, J. (1995). Democratization and the danger of war.
International Security, 20(1), Summer.
- Butarbutar, B. S. (2003). Soeyono: Bukan puntung rokok.
- Kasenda, P. (2018). Peristiwa 27 Juli 1996: Titik balik perlawanan rakyat. Media
Pressindo.